

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas Kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan meningkatnya investasi sebesar 101,4% serta jumlah ijin yang diterbitkan sebanyak 4.657 buah dengan capaian 186,28 % melebihi target, dari target 2.500 ijin pertahun, dengan rincian sbb: ,

SITU/HO = 129 lembar, Domisili = 711 lembar, SIUP = 174 lembar, TDP = 183 lembar, Hiburan Umum = 1 lembar, Bilyard = 1 lembar, Reklame= 39 lembar, Praktek dokter = 38 lembar, Praktek Bidan = 270 lembar, Praktek Perawat = 179 lembar, Ijin Apotik = 3 lembar, Toko Obat = 2 lembar, Ijin Praktek Apotiker = 4 lembar, Produksi IRT= 34 lembar, SIUJK = 47 lembar, IMB = 2.746 lembar, Operasional Pendidikan = 33 lembar, Ass.Apotiker = 9 lembar, Ijin Lokasi= 15 lembar, Ijin Kursus = 5 lembar, STPT = 1 lembar, Warnet = 1 lembar, Izin Fisioterapis = 1 lembar, TDG = 2 lembar, TDI = 1 lembar, IUI = 1 lembar, IMB Bangunan Lainnya = 71 lembar.

Jumlah SKRD yang dikeluarkan sebanyak 101 lembar dari target 100 buah SKRD pertahun dengan rincian sbb: SKRD IMB = 101, sedangkan jumlah pemohon ijin sebanyak = 1.927 pemohon.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator sasaran dan mengacu pada 1 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

**“Tabel Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2018”**

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Meningkatnya Pelayanan Perijinan	Indeks kepuasan Masyarakat	83,66	-	-	-	-	83,00	99,21
2.	Meningkatnya tertip perizinan tertentu	Persentasi peningkatan jlh investasi	100	101,4	101,4	-	-		
		Persentasi jumlah izin yg diterbitkan	100	186,28	186,28	-	-	-	-

		Jumlah ijin yang diterbitkan	2.500	4.627	185,08	-	-	-	-
		Jumlah SKRD yang dikeluarkan	100	101	101	-	-		
		Jumlah SOP yang dibuat	8	-	-	8	100	-	-
		Jumlah SOP yang diterapkan	8	-	-	8	100	-	-
		Jlh.Nilai investasi	500	507	101,4	-	-	-	-
		Jumlah Lap/Lok Monev	42	-	-	42	100	-	-
		Jumlah Dok./Lok Data Perizinan.	1	-	-	1	100	-	-